# *PEREMPUAN DALAM PEMERINTAHAN*
# (Kajian Tentang Eksekutif Perempuan di Lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Kepulauan Riau)

**Wahjoe Pangestoeti, Rahmi**

Universitas Maritim Raja Ali Haji

## ABSTRACT

*This research used qualitative approach and it is descriptive research. This research was conducted in Tanjungpinang. The focuses of this research were: 1) reasons of importance of the executive women empowerment, 2) starategies and steps done in the executive women empowerment.*
*The technique of sampling is snow ball. Data used in this research are primary data taken from the in depth interview with the informants and the secondary data, which were taken from documentation and field observation results. Meanwhile the data analysis applied the interactive data analysis technique developed by miles and Huberman involving data reduction, data presentation and concluding remarks.*

*By using methods above it was found that there are two reasons of why executive women empowerment is important: 1)because women and men have the equal opportunity to take a part in development and governments including to have a high position 2) because there is no difference in gender as stated in government role long time ago. Strategies done by executive women were to enrich or increase the education, there is a nice working atmosphere and support each other and to develop the ability to do a task and responsibility.*

***Keywords:*** *Executive Women, government, gender*



Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

## PENDAHULUAN

Bergesernya pendekatan dalam studi administrasi negara dari pendekatan non ekologis ke pendekatan ekologis, mempunyai implikasi besar pada ruanglingkup administrasi negara. Jika sebelumnya administrasi negara hanya terfokus pada persoalan organisasi mikro, sekarang ini administrasi negara mempunyai ruang lingkup yang cukup luas,yang meliputi ruang persoalan masyarakat secara luas.

Kondisi ini kemudian dipersubur dengan diadakannya *konferensi minnowbrook* yang akhirnya melahirkan suatu gerakan yang disebut *neo public administration* (Administrasi Negara Baru) yang dipelopori oleh Waldo dan George Frederickson. Gerakan ini yang memunculkan isu-isu yang selama ini terlupakan oleh administrasi negara, seperti isu tentang pelayanan publik dan keadilan sosial, termasuk keadilan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan, warga kota – desa dan sebagainya.

Sejak saat itulah perhatian terhadap kesamaan perlakuan yang adil, termasuk antara laki-laki dan perempuan, mulai menampakkan *gemanya.* Isu tersebut tidak saja menjadi isu lokal, akan tetapi sudah menjadi isu internasional dan global, bahkan jauh-jauh hari Max Weber, bapak birokrasi modern telah memperingatkan akan pentingnya birokrasi modern yang diisi oleh orang profesional, yang mengangkatannya berdasarkan pertimbangan obyektif, rasional dan impersonal dan tidak didasarkan pada pertimbangan parokhial, seperti warna kulit atau jenis kelamin.

Salah satu tonggak sejarah dalam perjuangan perempuan pada tingkat internasioanl terwujud dalam " *World Conference On Internasional Years Of Women"* yang diselenggarakan oleh PBB di Mexico City pada tahun 1975. (Tjokrowinoto, 1996:65) Konferensi ini melakukan deklarsi yang menggaris bawahi bahwa Tahun Perempuan Internasional 1975 diperuntukkan bagi peningkatan kegiatan yang mendorong persamaan antara laki-laki dan perempuan, pengintegrasian perempuan dan keseluruhan kegiatan pembangunan.

Di Indonesia kesadaran akan pentingnya perempuan dalam pembangunan dan pemerintahan sudah dimulai sejak Era Pembangunan 25 tahun yang lalu.



Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, dalam bidang organisasi, untuk menunjang program peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan, pemerintahan telah membentuk berbagai organisasi perempuan yang secara garis besar dikatagorikan menjadi : *pertama*, para istri pegawai negeri dikelompokkan dalam Dharma Perempuan; *kedua*, para istri anggota ABRI dikelompokkan dalam Dharma Pertiwi; ketiga, para ibu rumah tangga didaerah pedesaan dan kota yang bukan istri pegawai negeri sipil / ABRI diciptakan Organisasi PKK, yang secara eksplisit dinyatakan oleh GBHN 1983 sebagai salah satu organisasi perempuan untuk mendorong partisipasi perempuan Indonesia dalam pembangunan. (Katjasungkana, dalam Soetrisno 1997;67-68).

**Perumusan Masalah**

Bertolak dari pemikiran diatas maka permasalahan pokok dari penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa pemberdayaan perempuan eksekutif perlu dilakukan.
2. Strategi dan cara-cara apa yang ditempuh dalam pemberdayaan perempuan eksekutif.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Pemberdayaan

Istilah ’empowerment’ berasal dari perkataan bahasa Inggris yang diterjemahkan ’pemberdayaan’ atau ’pemampuan’. Dalam Webster dan Oxford English Dictionary, kata empower mengandung dua makna, yaitu: to give power or authority dan to give ability to or to anable to. Pengertian pertama bermakna memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan kepihak lain. Pengertian kedua bermakna sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan (dikutip Lukman Arif dan Prijino dan Pranarka, 1996)

Menurut Cook S dan Macaulay (1998) pemberdayaan merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen yang dapat membantu menciptakan suatu lingkungan dimana setiap individu mempergunakan serta



Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

menggali kemampuan untuk meraih tujuan organisasi. Sedangkan menurut Jan Carlan dalam Cook S (1998) pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide, tindakan dan keputusan-keputusannya.

Walaupun konsep yang dikemukakan oleh para ahli berbeda-beda, namun pemberdayaan mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk membangun daya dan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta upaya untuk mengembangkannya. Dalam kerangka pemberdayaan ini ginanjar Kartasasmita (1996) mengemukakan 2 hal yakni:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakan berkembang (enabling) dengan titik pandang bahwa setiap manusia (masyarakat) memiliki potensi. Dengan menciptakan iklim yang kondusif, maka potensi masyarakat dapat berkembang dengan memberikan dorongan, motivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya.
2. Memperkuat potensi (empowering) dengan langkah-langkah konkrit yang menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) dan pembukaan (akses) ke dalam berbagai kesempatan (opportunities) yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.

**Eksistensi Peranan Perempuan**

Pengakuan atas pentingnya peran yang dimainkan oleh kaum perempuan dalam pembangunan di Negara Dunia Ketiga, tidak berarti hal itu sudah terwujud dalam praktek perencanaan pembangunan. Hubies seperti yang dikutip oleh Achmad (1994) mengatakan bahwa alternatif mengenai peran perempuan dapat dillihat dari tiga perspektif dalam kaitannya dengan posisinya sebagai manajer rumah tangga dan partisipan pembangunan atau pekerja pencari nafkah.

a. Peran tradisi sering juga disebut peran domestik menjadi urusan perempuan, semua pekerjan rumah dari membersihkan rumah, memasak, mencuci, merawat atau mengasuh anak dan masih banyak pernik-perniknya yang berkaitan dengan rumah tangga. Perempuan sebaiknya dirumah saja agar urusan menjadi terselesaikan dengan baik.



Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

b. Peran transisi yang terjadi khususnya di daerah pertanian, perempuan sudah terbiasa bekerja di lahan pertanian keluarga, bila di kota bekerja di usaha keluarga.
c. Peran kontemporer jika seorang perempuan hanya memiliki peran diluar rumah tangga pada saat ini masih disebut perempuan kontemporer atau wanita karir. Biasanya mereka memilih hidup tidak menikah dan mencari nafkah sendiri. Ini terdapat di kota-kota besar.

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan, menganalisa dan menginterpretasikan aspek-aspek yang berhubungan dengan :

a. Perlunya dilakukan pemberdayaan perempuan eksekutif.
b. Strategi dan cara –cara yang ditempuh dalam pemberdayaan perempuan eksekutif .

### 2. Manfaat Penelitian

Disamping itu penelitian ini diharapkan hasilnya akan memberi manfaat:

a. *Secara teoritis*, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat, khususnya tentang pemberdayaan perempuan eksekutif yang lebih berorientasi pada keswadaan, kemandirian dan keberdayaan serta dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya
b. *Secara praktis*, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan *(input)* bagi Pemerintahan Propinsi Kep.Riau, dalam melakukan peningkatan dan pembinaan yang lebih efektif dalam upaya meningkatkan peranan dan posisi perempuan eksekutif di masa-masa yang akan datang, sehingga ada timbul rasa percaya diri yang lebih bagi perempuan, khususnya perempuan eksekutif.



Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (naturalistik ), karena bermaksud untuk menemukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh gambaran (deskripsi) tentang apa yang tersembunyi dibalik upaya pemberdayaan perempuan di Propinsi Kep.Riau , termasuk didalam khususnya pada upaya meningkatkan keberdayaan perempuan eksekutif, yang merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami.

### *2.* Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah: (1) Alasan-alasan perlunya pemberdayaan perempuan eksekutif, (2) Strategi dan cara-cara yang ditempuh dalam pemberdayaan perempuan eksekutif .

### 3. Lokasi dan Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Propinsi Kep.Riau. Dipilihnya lokasi tersebut adalah secara sengaja (purporsive), karena keunikan yang dimilikinya, yaitu: (1) Disamping dikenal sebagai ibu kota propinsi baru, kota industri, dan kota pariwisata, kota Tanjungpinang propinsi Kep.Riau juga merupakan ibu kota propinsi Kep.Riau. Sehingga kota ini mempunyai instansi/ lembaga pemerintahan daerah yang cukup besar dan luas.

### 4. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : (1) *Informan*, adalah oarng dalam yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dan untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait denagn fokus penelitian, maka informanditentuka secara *purposive* pada tahapa awal dan dalam pengembangannya dilakukan *snowball*. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan awal adalah Kepala Badan Kepegawaian Pemerintahan. Dari Kepada Badan Kepegawaian ini selanjutnya peneliti menghubungi Sekretarias Daerah, setelah diperoleh informasi mengenai perempuan yang berperan sebagai perempuan eksekutif, kegiatan selanjutnya disamping melakukan wawancara dengan beberapa perempuan pada umumnya, maka konsentrasi lebih diarahkan kepada perempuan yang berperan sebagai



Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

perempuan eksekutif, dan pejabat terkait, sampai data yang diperoleh mengalami tingkat kejenuhan.

Sumber data selanjutnya adalah (2) *Peristiwa atau situasi*, yaitu berbagai peristiwa atau situasi yang diobservasi dan berkaitan dengan masalah atau fokus penelitian, (3) *Dokumen*, berupa peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan eksekutif.

**5. Proses Pengumpulan Data.**

Selanjutnya untuk proses pengumpulan data, dalam penelitian ini meliputi tiga tahap, yaitu: (1) proses memasuki penelitian (*Getting In)*, (2) Ketika berada di lokasi penelitian (*Getting Along*), (3) Menggunakan Data (*Loging the data*).

**6. Analisa Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (interactive model of analysis) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.(1992) yang terdiri dari tiga komponen analisis, yaitu: (1) Reduksi Data (reduction data), (2) Penyajian data (data display), (3) Penarikan kesimpulan (conclucying drawing).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**1. Pemberdayaan Perempuan**

Sejak dilaksanakannya otonomi daerah, sudah ada peraturan yang lebih mengacu kepada pemberdayaan perempuan pada umumnya dan perempuan eksekutif khususnya, yaitu Instruksi Presiden RI noomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2000. Instruksi ini ditujukan kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan



Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Kesekretariatan Lembga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung RI dan Gubernur di seluruh Indonesia serta Bupati dan Walikota.

## 2. Alasan Perlunya Pemberdayaan Perempuan Eksekutif

**Pertama** perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki. Menurut pandangan Longsdan (1985) bahwa perhatian terhadap kehadiran kaum perempuan dalam birokrasi berbagai instansi pemerintahan diwarnai oleh paling sedikit dua segi pandangan, yaitu: pertama, berkaitan dengan masalah 'pemerataan kesempatan' atau 'masalah keadilan', termasuk kesempatan untuk menduduki jabatan penting di bidang politik maupun administrasi pemerintahan; kedua, berkaitan dengan masalah yang secara umum dapat disebut 'efektifitas'.

Sedangkan Aisyah Amini dalam Prisma (1996) mengatakan bahwa hambatan perempuan untuk maju tentunya bukan hanya karena faktor budaya, disini banyak persoalan yang saling terkait seperti: pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dedikasi dan kesempatan. Walaupun sudah memiliki pendidikan, pangalaman, dan dedikasi, akan percuma bila tidak ada kesempatan. Begitu pula sebaliknya walaupun kesempatan sudah diberikan, tetapi tidak ada kemampuan, pendidikan, pengalaman dan dedikasi juga tidak akan berhasil. Oleh sebab itu semuanya ini harus berkembang.

Berangkat dari kedua pemikiran diatas, dimana perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang, termasuk untuk menduduki suatu jabatan di pemerintahan, dan bila dihubungkan dengan kondisi saat ini dimana masih adanya keragu-raguan bila perempuan eksekutif diberikan peluang untuk menjadi seorang pemimpin, maka sebetulnya keragu-raguan tersebut sudah saatnya dikurangi dan kalau perlu sudah seharusnya untuk dihilangkan.



Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Di dalam usaha pembangunan, jelas dikehendaki suatu orientasi dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh seseorang, dan di dalam usaha perombakan dan penyempurnaan administrasi pemerintahan harus pula penyempurnaan-penyempurnaan dalam orientasi dan adminstrai, yaitu membina suatu sistem karier yang didasarkan atas prestasi yang dimiliki dan kemampuan yang dipunyai.

Tjokroamijoyo (1987) mengatakan bahwa: pertama, penerapan sistem karier berdasarkan prestasi dan kemampuan kerja sangat perlu dikembangkan di dalam administrasi. Sistem karier yang didasarkan pada prinsip merit atau prestasi kerja, dimaksudkan sebagai prinsip bahwa seseorang yang bekerja pada pemerintahan, masuknya dalam dinas, penempatannya, promosi kenaikan pangkat, didasarkan atas dasar standar-standar obyektif terhadap prestasi maupun kemampuan; kedua, bahwa sistem karier birokrasi pemerintahan hendaknya bebas dan tidak memihak dari pengaruh kepentingan kekuatan yang masuk atau berpengaruh dan berperan dalam proses. Demikian pula bebas dari tidak memihak dari pengaruh kepentingan serta selera perseorangan atau yang bersifat pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian, memang dapat dikatakan bahwa secara umum yaitu dengan melihat kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada perbedaan antara perempuan eksekutif dan laki-laki eksekutif di dalam hal untuk diletakkan atau dipromosikan disuatu jabatan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ada faktor-faktor tertentu (dekat dengan pimpinan, suka mengambil hati pimpinan) juga ikut mempengaruhinya. Dalam hal ini sudah tidak rahasia lagi diketahui oleh masyarakat, serta sangat bertolak belakang dengan aturan yang sebenarnya.

Senada dengan apa yang disampaikan Usman (1998) yang mengatakan bahwa secara normatif, kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sejajar. Akan tetapi dalam kehidupan nyata seringkali terendap apa yang lazim disebut dengan istilah gender stratification, yang menempatkan status perempuan dalam tataran hirarkhis, pada posisi subordinand atau tidak



Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

persis sejajar dengan posisi kaum laki-laki. Tataran hirarkhis demikian antara lain ditandai oleh kesenjangan ekonomi, perbedaan akses pada sumber-sumber ekonomi dan sekaligus kesenjangan atau perbedaan akses pada peran politik.

**Kedua,** Kesetaraan atau keadilan gender. Berpedoman kepada INPRES nomor 9 tahun 2000 tanggal 19 Desember 2000 mengenai pedoman pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Bab I (Umum) dalam instruksi dimaksud dinyatakan bahwa: (i) Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut; (ii) Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Dari konsep di atas, karena belum adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, dan proses untuk menjadi adil antara laki-laki dan perempuan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Secara umum, upaya yang dilakukan oleh perempuan eksekutif sudah cukup baik, yaitu dengan kenyataan sudah mulai banyaknya perempuan yang berpendidikan dan berwawasan luas, serta siap dan tanggap terhadap perkembangan yang dihadapi. Akan tetapi bila dibandingkan dengan laki-laki yang menduduki posisi-posisi strategis, maka jumlah perempuan belumlah sebanding dan tidak seimbang dengan laki-laki.

Sumartono, dkk (1998) mengatakan bahwa berdasarkan suatu ketentuan konstitusional yang bersifat yuridis formal, bahwa Indonesia tidak membedakan antara derajat pihak kaum laki-laki dan kaum perempuan. Hal ini dapat dilihat dari salah satu pasal yang tertuang dalam UUD'45 yang intinya mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kendatipun demikian dalam



Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

prakteknya ternyata masih ada kesenjangan yang sangat tajam, terutama dalam posisi mereka di bidang politik dan pemerintahan.

Kenyataan memang walaupun ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dan juga sudah merupakan suatu program pemerintah mengenai kesetaraan atau keadilan gender, itu belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini didasarkan kepada belum banyaknya jumlah perempuan eksekutif yang memegang jabatan, jika dibandingkan dengan jumlah laki-laki.

**Strategi dan cara yang ditempuh dalam pemberdayaan perempuan eksekutif .**

**1. Strategi yang ditempuh dalam pemberdayaan perempuan eksekutif**

Pada dasarnya tingkat pendidikan adalah merupakan hal yang sangat penting dan menunjang serta memudahkan seseorang dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Pendidikan yang harus dimiliki tentunya adalah pendidikan dan pengetahuan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya yang nantinya akan memudahkan dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Kesempatan dalam mengikuti pendidikan dan latihan, serta juga dalam hal adanya keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik terhadap perempuan eksekutif maupun laki-laki sangat berpeluang sekali dan terbuka lebar tanpa adanya perbedaan. Peluang ini telah dimanfaatkan dengan baik oleh perempuan eksekutif yaitu dengan menambah pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan ini merupakan salah satu strategi yang ditempuh.

Dari hasil penelitian, dapat dikatakan antara perempuan eksekutif dengan laki-laki dalam kegiatan sehari-hari, tercipta suasana dan kondisi kerja yang baik, saling membantu, saling menghormati, karena adanya keterkaitan yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini oleh perempuan



Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

eksekutif juga dijadikan sebagai strategi yang mereka tempuh dalam pemberdayaan diri sendiri. Bagi perempuan pada umumnya dan perempuan eksekutif khususnya dengan adanya kesempatan dalam meningkatkan pendidikan dan ditunjang pula oleh kondisi kerja yang saling membantu, saling menghormati karena keterkaitan yang satu dengan lainnya ini, telah direspon secara positif oleh perempuan pada umumnya dan perempuan eksekutif khususnya. Dengan potensi yang dimiliki, perempuan eksekutif berupaya untuk lebih meningkatkan keberdayaan dirinya, berupaya untuk meningkatkan mutu profesionalisme, dengan melalui berbagai kesempatan seperti dalam rapat-rapat perempuan berusaha mengeluarkan pemikiran/pendapatnya dan memperlihatkan keberadaannya.

Apabila diamati maka strategi yang dilakukan perempuan eksekutif ini, dengan didukung suasana kerja yang saling membantu, dan adanya rasa keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, adalah merupakan suatu hal yang akan memperlancar peranan dan tanggung jawab dari perempuan itu sendiri.

**2. Cara yang ditempuh dalam pemberdayaan perempuan Eksekutif**

Dengan adanya keinginan untuk mengembangkan diri sendiri yang merupakan pemberdayaan diri sendiri, karena potensi yang dimiliki perempuan, adalah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam pemberdayaan perempuan eksekutif. Disamping itu keinginan tersebut juga mendapat respon dari lembaga atau instansi yang bersangkutan. Upaya pengembangan diri sendiri ini dilakukan dengan cara menambah atau memperluas wawasan, dengan melalui proses belajar (learning by process), baik yang dilakukan secara formal maupun informal. Selain itu juga berusaha memfungsikan peran ganda yang diembannya sebagai perempuan karier dan sebagai ibu rumah tangga.



Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Dari hasil penelitian, dapat dikatakan kalau tingkat pendidikan perempuan eksekutif di lingkungan pemerintah kota Malang cukup baik, apabila hal ini didasarkan kepada golongan dan kepangkatan yang dimiliki. Namun demikian sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman masih perlu untuk ditingkatkan. Dengan tingkat pendidikan yang sudah dimiliki dan adanya keinginan untuk lebih maju serta lebih berkembang lagi, adalah merupakan cara yang sangat baik dalam upaya mengembangkan potensi yang dimiliki, karena bagaimanapun pemberdayaan (empowerment) itu haruslah dimulai dari diri sendiri. Prijono (1997) mengatakan bahwa pemberdayaan dimulai dari diri kita masing-masing dimana pendidikan merupakan faktor kunci yang ditunjang dan dilengkapi oleh pemberdayaan psikologi, sosial budaya, ekonomi dan politik.

Prijono (1997) mengatakan bahwa dalam Platform for Action yang dikemukakan pada Konferensi Dunia keempat mengenai perempuan di Beijing, di bagian pemberdayaan dan pengambilan keputusan di kemukakan bahwa perlu untuk menjamin persamaan akses perempuan atas partisipas penuh dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan. Disamping itu, juga perlu meningkatkan kapasitas perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan.

Kepemimpinan dalam konteks pemberdayaan politik adalah kedudukan berkuasa dan berwenang untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan pekerjaan banyak orang. Dalam proses pemberdayaan politik, seorang pemimpin khususnya perempuan perlu memiliki bekal kepemimpinan. Sebagai pemimpin perempuan harus bisa menggerakkan, dan membuat perubahan-perubahan sosial, ke arah yang lebih baik, atau sebagai agent of social change. Seorang pemimpin perempuan itu juga perlu memiliki kemampuan untuk turut mengambil keputusan yang di dukung oleh kemauan, dan keberanian dengan menggunakan kesempatan untuk menjadi teman seperjuangan laki-laki. Selain itu seorang pemimpin perempuan juga harus memiliki kepekaan



Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

terhadap lingkungannya, sehingga dapat menampung aspirasi dan keinginan masyarakat serta mengantisipasi permasalahan yang timbul.

Berdasarkan konsep di atas, dan jika dihubungkan dengan cara yang dilakukan oleh perempuan eksekutif, dapat dikatakan bahwa cara yang dilakukan tersebut adalah merupakan wujud atau cara pemberdayaan diri sendiri dalam upaya mengembangkan dirinya menjadi lebih baik dan bersifat aktif, dan dalam upaya meningkatkan kapasitas perempuan agar dapat berpartisipasi penuh dalam kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan.

Dengan mengembangkan diri atau karier melalui jenjang pendidikan akan menghasilkan seorang pemimpin yang akan dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta akan dapat mengadakan perubahan-perubahan sesuai dengan yang diharapkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara normatif kesempatan antara laki-laki dan perempuan memang sama, akan tetapi dalam implementasinya belum dapat dikatakan sama. Hal ini berdasarkan kepada: Adanya faktor lain yang ikut menentukan dalam menempatkan seseorang untuk duduk di suatu jabatan, disamping itu secara nyata jumlah perempuan yang dapat menduduki posisi-posisi kunci, jabatan-jabatan strategis belum seberapa bila dibandingkan dengan laki-laki. Kecilnya jumlah perempuan eksekutif yang menduduki posisi-posisi strategis ini, terutama disebabkan karena belum diimplementasikannya secara konsisten dan komprehensif peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan ditambah lagi karena belum adanya kepercayaan yang penuh terhadap kemampuan atau kapabilitas perempuan untuk menjadi seorang pemimpin.
2. Alasan-alasan perlunya pemberdayaan perempuan eksekutif dilakukan adalah karena perempuan mempunyai kesempatan dan peluang yang sama dengan laki-laki untuk ikut berperan serta dalam pembangunan dan pemerintahan, termasuk dalam menduduki posisi atau jabatan. Disamping itu juga sudah merupakan program dari pemerintah sendiri yaitu, mengenai kesetaraan atau keadilan gender yang perlu untuk disosialisasikan, akan



Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

tetapi dalam kenyataannya program tersebut belum diimplementasikan sesuai tujuannya.

3. Strategi yang ditempuh perempuan eksekutif adalah dengan menambah atau meningkatkan pendidikan dan pengetahuan. Terciptanya suasana kerja yang baik dan saling mendukung juga merupakan strategi yang ditempuh, dan disamping itu juga berusaha mengembangkan potensi yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan ikut memberikan masukan-masukan dalam proses pengambilan keputusan dan rapat-rapat.
4. Pemberdayaan diri sendiri melalui proses belajar baik secara formal maupun informal, dan berusaha untuk dapat memfungsikan peran ganda yang diembannya baik sebagai perempuan karier atau perempuan eksekutif, maupun sebagai ibu rumah tangga adalah merupakan cara yang ditempuh oleh perempuan eksekutif.

**Saran**

1. Dengan menetapkan perundang-undangan dan peraturan saja, tidak cukup untuk menjamin perlakuan yang sama bagi perempuan di segala bidang. Akan tetapi implementasi dari perundang-undangan dan peraturan tersebut perlu dilakukan secara konsisten dan komprehensif, baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga dan instansi yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan pada umumnya dan perempuan eksekutif khususnya. Agar kesetaraan dapat berhasil dan mencapai sasarannya, diperlukan upaya untuk mengintegrasikan kebutuhan atau keperluan perempuan dalam kebijakan nasional secara makro. Selain itu, diperlukan juga upaya meningkatkan kesadaran gender dalam masyarakat, khususnya dalam kalangan para pengambil keputusan, perencana dan birokrat sebagai pelaksana pembangunan.
2. Kemampuan atau kapabilitas seorang pemimpin haruslah dimiliki oleh perempuan eksekutif, agar alasan adanya kesempatan yang sama, termasuk kesempatan dalam menduduki suatu jabatan dan kesetaraan atau keadilan gender yang sudah menjadi program pemerintah bisa sepenuhnya diimplementasikan. Sehingga terjadinya kesenjangan yang sangat tajam tersebut dapat dikurangi dan kalau memungkinkan bisa dihilangkan.
3. Agar strategi dan cara yang ditempuh perempuan eksekutif dapat mencapai tujuannya, diperlukan kekonsistenan dalam mengimplementasikan peraturan dan perundang-undangan, serta kedisiplinan dari perempuan eksekutif terhadap pembagian peran sebagai perempuan eksekutif atau karier, dan kodratnya sebagai perempuan yang tidak mungkin untuk ditinggalkan.



Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

4. Bagaimanapun perempuan pada umumnya dan perempuan eksekutif khususnya, dalam berkarier memang selalu menghadapi kendala yang sangat sulit untuk dihilangkan, oleh sebab itu janganlah kendala yang dihadapi tersebut dianggap sebagai hambatan dalam berkarier, tetapi letakkanlah kendala tersebut sebagai tantangan yang harus dilalui dan dinikmati atau dihadapi.

## DAFTAR PUSTAKA


Lincoln, Yvonna dan Egon G, Guba, 1984, *Naturalistic Inguiry*, Beverly Hills, Sage Publication , london

Longsdan, Martha. G, 1985, *Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia,Sebuah Pengantar Awal*. Prisma No. 10

Pranarka,KMW dan Prijono, Onny.S (ED), 1996, *Pemberdayaan, konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.

Prisma No.5,1996, *Wanita-wanita Diatas Pentas Politik*, LP3ES, Jakarta.

Soetrisno, Loekman,1997, *Kemiskinan, Perempuan, Pemerdayaan*,Kanisius, Jogyakarta.

Siagian,S.P.,1995, *Eksekutif Yang Efek*tif, Cetakan Keempat, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.

Stewart, Michell Ailen, 1998, *Empowering People (Pemberdayaan Sumber Daya Manusia)*, Kanisius, Jogjakarta. Diterjemahkan oleh Agus.M. Hardjana.

Strauss, Anselm & Corbin, J.,1990, *Basic Of Qualitatif Research* Sage Publication, London.

Sumartono, dkk,1998, *Kepemimpinan Kepala Desa Wanita Dalam Pembangunan Desa*, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Soaial (Sosial Sciences) Vol. 10. No.2 Agustus 1998, Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya Malang

Tjokroamidjojo, Bintoro,1987, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta

Tjokroamidjojo, Moelayarto, 1996 *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajr, Jogjakarta.




Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Usman, Sunyoto, 1998, *Pembangunan dan Pemmberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.



Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/